

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH PENGANGKUT SAMPAH**

(Studi Di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**HERMAWAN**  
**NPM.1621030234**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGAMBILAN UPAH  
TERHADAP PENGANGKUT SAMPAH  
(Studi di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H / 2020 M**

## ABSTRAK

Upah merupakan suatu imbalan yang harus di bayarkan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaan nya. Begitu juga terhadap pengangkut sampah di kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung, yang mendapatkan gaji setiap bulan nya dari pemerintah daerah kota Bandar Lampung sebagaimana yang tercantum dalam PERDA Kota Bandar Lampung no 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi di samping mendapatkan gaji pokok dari pemerintah daerah kota Bandar Lampung petugas pengangkut sampah masih meminta upah terhadap masyarakat yang setiap hari di ambil sampah sisa makanan dan lain sebagainya. Pengambilan upah yang dilakukan petugas pengangkut sampah berbeda-beda nominalnya dari RP.20.000- 50.000, apabila masyarakat tidak mau membayar sesuai yang di minta maka petugas pengangkut sampah enggan untuk mengambil sampahnya padahal mereka sudah mendapat gaji dari pemerintah. Pengambilan upah ini dilakukan dengan sebelah pihak karna tidak ada perjanjian di awal antara masyarakat dan pengangkut sampah dan tanpa persetujuan pemerintahan di kelurahan setempat.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengambilan upah terhadap pengangkut sampah di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengambilan upah tersebut?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik pengambilan upah terhadap pengangkut sampah dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Upah Terhadap Pengangkut Sampah Di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pengambilan upah yang di lakukan petugas pengangkut sampah berbeda-beda ada yang Rp.20.000-50.000 setiap bulannya, padahal mereka sudah mendapat gaji pokok dari pemerintah daerah kota bandar lampung. Pengambilan upah ini tidak ada kesepakatan di awal pengangkut sampah meminta sesuka hati kepada masyarakat yang apabila tidak mau membayar sesuai yang diminta pengangkut sampah maka mereka tidak mau mengambil sampah tersebut. Sedangkan tinjauan hukum islam terhadap pengambilan upah tersebut tidak diperbolehkan karena ada unsur paksaan terhadap masyarakat dan juga tidak ada akad di awal antara petugas pengangkut sampah dan masyarakat hanya di putuskan oleh sebelah pihak saja.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermawan  
NPM : 1621030234  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Upah Terhadap Pengangkut Sampah Studi di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 September 2020  
Penulis

Hermawan  
NPM. 1621030234





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Lei. Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kodepos 35131*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahnya secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama Mahasiswa : Hermawan**

**NPM : 1621030234**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENGAMBILAN UPAH TERHADAP PENGANGKUT  
SAMPAH (Studi di Kelurahan Sukarame Kota Bandar  
Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

**NIP. 196603301992031002**

**NIP. 196901051998031003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kodepos 35131*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Upah Terhadap Pengangkut Sampah"** disusun oleh Hermawan, NPM. 1621030234 program studi Mu'amalah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Oktober 2020.

**Tim Penguji**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

**Penguji I : Drs. Chaidir Nasution, M.H.**

**Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Penguji III : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa : 29)*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa asyukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Suripto dan Ibu tercinta Ratih, terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbakan untukku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dankesuksesanku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi,terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian.Terimakasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.
2. Terimakasih Kepada kakak saya Mulyono S.H. dan Suharti yang selalu mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini dan tidak berhenti menasehati saya.
3. Adikku tercinta Muslimin dan Nur Kholis, juga untuk ponakan ku tersayang Zakira Eka Safitri terimakasih atas segala do'a dukungan dan kasih sayang.
4. Seluruh keluarga dan saudaraku yang telah mendukung dan mendo'akan saya.
5. Alamamater tercinta UIN Raden Intan Lampung semoga ilmu yang ku pelajari selama ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi semua orang.



## RIWAYAT HIDUP

Hermawandilahirkan di Dusun Margaluyu, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan. Pada Tanggal 05 Juli 1997, anak ketiga dari pasangan suami isteri Suriptodan Ibu Ratih.

1. Penulis mulai menempuh Pendidikan dasar di SD Negeri 01 Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Oku Selatan, dan lulus pada tahun 2010.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Darul Huda Buay Pemaca, lulus pada tahun 2013.
3. Melanjutkan Pendidikan menengah atas di MA Nurul Iman Tanjung Bulan Kasui, lulus pada tahun 2016.
4. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 02 September 2020

**HERMAWAN**  
NPM. 1621030234

## KATA PENGANTAR

*Assalam'ualaikum wr, wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Upah Terhadap Pengangkut Sampah” (Studi kasus di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung) dapat diselesaikan, Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya, dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr.H. Khairudin, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memfasilitasi kepentingan-kepentingan mahasiswa.



4. Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu banyak dalam membimbing penulis dan memberikan saran serta motivasi-motivasi terbaiknya.
5. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu banyak dalam membimbing penulis dan memberikan saran serta motivasi-motivasi terbaiknya.
6. Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memfasilitasi kepentingan-kepentingan mahasiswa.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Seluruh Guru-Guruku sejak penulis mulai mengenal huruf sampai sekarang, yang telah memberikan pengetahuan serta mendidik dengan penuh cinta kasih.
9. Terimakasih untuk sahabat terdekatku Sutiyah yang selama ini tidak bosan-bosan menasehatiku saat semangatku hilang juga terimakasih sahabat satu kosku Umaedi yang selalu bersama susah dan senang hidup di kosan.
10. Sahabatku tersayang, Darwin Wijaya, Bintang Haikal, Nurbawi, Sahri Darmawan, Yusuf Sulaiman, Zainul Khosiin yang telah menemani dan mensupport diriku yang membagikan pengalaman dan cerita yang penuh dengan kenangan dan motivasi yang tiada terlupakan oleh ruang dan waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan atau lebih tepatnya jauh dari kata sempurna, oleh karena keterbatasan, kurang mampuan,

pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi literasi ilmu pengetahuan dan semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.  
*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Bandar Lampung, 02September 2020

**HERMAWAN**  
NPM. 1621030234





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BABI PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Fokus Penelitian.....	9
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Signifikansi Penelitian .....	10
H. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian teori .....	18
1. Upah ( <i>Ujroh</i> ) Dalam Islam .....	18
a. Pengertian Upah ( <i>Ujroh</i> ).....	18
b. Dasar Hukum Upah( <i>Ujroh</i> ).....	22
c. Rukun Dan Syarat Upah( <i>Ujroh</i> ) .....	28
d. Waktu Pembayaran Upah ( <i>Ujroh</i> ) .....	36
e. Batal Dan Berakhirnya Upah( <i>Ujroh</i> ) .....	38
2. Pengertian Sampah.....	39
a. Definisi Sampah.....	39
b. Sumber Sampah .....	40

c. Jenis-Jenis Sampah.....	42
d. Pengelolaan Sampah .....	44
e. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pengelolaan Sampah.....	51
f. Dampak Negatif Sampah yang Tidak di Kelola .....	54
B. Kajian Pustaka.....	54

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran umum Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.....	55
1. Sejarah Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung .....	55
2. Kondisi Demografi Kelurahan Sukarame .....	56
3. Kondisi Ekonomi Kelurahan Sukarame.....	57
4. Kondisi Pendidikan Kelurahan Sukarame .....	59
5. Kondisi Sosial Budaya Kelurahan Sukarame .....	60
B. Praktik Tentang Sistem Pembayaran Upah Terhadap Pengambilan Sampah di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung. ....	62
1. Upah Yang di Berikan Pemerintah Kota Bandar Lampung.....	63
2. Upah Yang diminta Kepada Masyarakat Kelurahan Sukarame Oleh Petugas Pengambil Sampah.....	64

### **BAB IV ANALISIS**

A. Praktik Tentang Sistem Pembayaran Upah Terhadap Pengambilan Sampah di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung. ....	68
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Upah Terhadap Pengambilan Sampah di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi .....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1. Rentan Waktu Pengolahan Sampah .....	47
2. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung .....	58
3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan Sukarame Bandar Lampung .....	59
4. Data Jumlah Sarana Pendidikan Kelurahan Sukarame Bandar Lampung .....	61



## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memahami maksud judul skripsi ini menghindari kesalah pahaman, maka perlu adanya pemaparan secara singkat mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi, skripsi ini berjudul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi di Rt/Rw 004/003 44Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung). Adapun istilah yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Tinjauan adalah memeriksa, mengamati, pandangan, dan pendapat setelah menyelidiki suatu objek penelitian.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas didalam Al-Qur'an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqh.<sup>2</sup>

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h. 1811.

<sup>2</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil, Abd al-Karim)* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), h.197.

<sup>3</sup> Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.



Sampah menurut penulis yaitu suatu benda yang sudah tidak terpakai dalam aktifitas manusia baik berbentuk padat maupun cair.

Berdasarkan penjelasan judul di atas maksud dari penelitian tersebut penulis ingin mengetahui status hukum terhadap sistem upah pengangkut sampah di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung) adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Pemberian upah terhadap pengangkut sampah di kelurahan Sukarame kota Bandar Lampung sudah terjadi sejak lama, akan tetapi belum banyak yang tahu bahwa petugas pengangkut sampah ternyata sudah di beri upah oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Masyarakat di kelurahan sukarame selalu rutin membayar tarif upah yang di minta oleh petugas pengangkut sampah, meskipun yang awalnya mereka hanya membayar sekitar Rp. 20.000 setiap bulan nya akan tetapi di bulan berikutnya ada kenaikan tarif pembayaran upah pengangkut sampah dikarenakan setiap harinya petugas pengangkut sampah yang biasanya mengambil sampah selalu berbeda orang sehingga setiap pengambilan tarif upahnya juga selalu berbeda. Kenaikan tarif upah yang diminta oleh petugas pengambil sampah selalu berbeda-beda dari Rp.20.000- 50.000 dan kenaikan tarif ini bahkan tanpa persetujuan dari pihak pemerintahan yang ada di kelurahan sukarame itu

sendiri sehingga masyarakat rela membayar berapapun yang di minta oleh petugas pengambil sampah, karena masyarakat tidak mau ribet untuk membuang sampah yang bekas-bekas sisa makanan.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Bahwa berkaitan dengan judul Tinjauan Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi Di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung). Menurut penulis layak untuk diteliti, dikarenakan belum ada yang membahas permasalahan tentang pemberian upah terhadap pengambil sampah.
- b. Pembahasan memiliki relevansi dengan disiplin Ilmu yang dipelajari oleh penulis, dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Ia menjadi sistem kehidupan yang mengatur segala aspek, termasuk dalam hal upah mengupah. Upah adalah sebuah bentuk kompensasi atau apresiasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut sebagai balasan karena telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan. Seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasull-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya. Tetapi perlu di ingat bahwa yang di anjurkan adalah yang sesuai dengan aturan agama Islam. Oleh karena itu apa bila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam bagaimana dengan upah yang diterima karena telah mengerjakan pekerjaan yang di larang oleh agama Islam.

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong karena tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. dengan adanya ijarah keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat.<sup>4</sup>

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin kiranya manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan didalam segala urusan. Agama Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong

---

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h.217.



menolong (*ta'awun*), menyayangi (*muwadah*), dan persaudaraan (*ikha'*). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Dalam surat Al-maidah Ayat:2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al- Maidah ayat 2).

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya.<sup>5</sup>

Dalam dunia modern seperti saat ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha.

---

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 163.

Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Pengusaha dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan Ilmu Ekonomi Islam. Sehingga, dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan.

Sampah merupakan benda yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun kering (an-organik) yang sudah tidak terpakai lagi.<sup>6</sup> Masalah sampah timbul dengan adanya peningkatan timbunan sampah per hari, namun tidak diimbangi dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memenuhi persyaratan teknis, sehingga banyak sampah yang tidak ditangani dengan maksimal. Dengan begitu banyaknya timbunan sampah maka dampak yang ditimbulkan pada lingkungan adalah :

1. Lingkungan menjadi terlihat kotor, kumuh dan jorok yang menjadi tempat berkembangnya organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia , seperti: sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya. Dengan demikian sampah berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit.

---

<sup>6</sup> Gibson. L james, *Organisasi dan Manajemen: Prilaku, Struktur dan Proses* (Jakarta: Erlangga, 1986), h.27.

2. Sampah yang membusuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Air yang dikeluarkan (lindih) juga dapat menyebabkan pencemaran sumur, sungai maupun air tanah.
3. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya menyumbat saluran drainase atau serapan air hujan sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir.
4. Pengumpulan sampah dalam jumlah yang besar memerlukan tempat yang luas, tertutup dan jauh dari pemukiman.

Dalam pengelolaan sampah khususnya di kelurahan sukarama, pemerintah kota Bandar Lampung telah membuat Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Dalam peraturan Daerah kota Bandar Lampung nomor 05 tahun 2015 pasal 47 ayat: 1 di jelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan pengurangan timbulan sampah. Dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah kota Bandar Lampung telah memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan pengurangan timbulan sampah.<sup>7</sup>

Di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarama Kota Bandar Lampung dalam penanganan persampahan, petugas pengambilan sampah melakukan pekerjaannya setiap hari dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat untuk mengambil sampah. Dalam setiap bulannya petugas pengambil sampah mendapatkan insentif atau gaji dari pemerintah daerah, meskipun petugas pengambil sampah mendapat gaji dari pemerintah masih terdapat sejumlah oknum yang masih

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 47 Ayat: 1 Tentang Pengelolaan Sampah.



meminta untuk pembayaran atas jasa pengambilan sampah tersebut kepada masyarakat. Padahal pemerintah daerah telah memberikan insentif kepada petugas pengambil sampah.

Dalam setiap bulan nya, petugas pengambilan sampah meminta uang kepada masyarakat yang telah di ambil sampah nya dengan harga yang berbeda yaitu antara Rp. 20.000- Rp. 50.000 setiap bulan nya. Dalam masalah ini masyarakat merasa tindakan tersebut tidak dibenarkan dikarenakan sebagian masyarakat mengetahui bahwa petugas pengambil sampah telah di beri gaji oleh pemerintah. akan tetapi ada sebagian masyarakat beranggapan wajar karena mereka merasa terbantu dengan adanya petugas pengambil sampah sehingga mereka tidak susah payah membuang sampah ketempat yang jauh.

Dalam pedoman umum Islam tentang masalah kerja, yaitu Islam tidak membolehkan pengikutnya untuk mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apapun yang di maksud. Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitik beratkan juga kepada masalah kemaslahatan umum. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang bersifat *kulli* (menyeluruh) artinya “ bahwa semua jalan untuk berusaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain, adalah tidak dibenarkan. Dan semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-invidu dengan saling rela-merelakan

adil dan tidak adanya unsur keterpaksaan dari pihak manapun adalah di benarkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dijadikan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung).

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik dalam Upah Pengangkut Sampah (Studi di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung).
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung).

#### **E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi dan analisis akan lebih terarah. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung).

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung).

---

<sup>8</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (bina ilmu, 1993), h. 193.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung).

### G. Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis sangat berharap dapat member manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Secara Teoritis

penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman keilmuan kepada masyarakat Tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung).

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi peneliti

penelitian ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

##### b. Bagi lembaga terkait

Hasil dari penulisan ini di harapkan mampu memberikan pemahaman terhadap para pihak Pengambil Sampah tentang pengambilan upah yang sesuai dengan syariat agama Islam.



## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. Alasan penulis menggunakan metode ini karena dalam penelitian ini membutuhkan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis yang mendalam dalam rangka untuk menemukan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung).

Menurut cresswel penelitian kualitatif adalah metode yang mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>9</sup>

Adapun tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang mengambil data dari lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan masyarakat tertentu, baik lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung ke tempat penampungan sampah yang berada di kelurahan Sukarame kota Bandar Lampung.

Selain dengan metode lapangan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa

---

<sup>9</sup>Creswel, John W. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 4.

<sup>10</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 21.

buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun belum di publikasikan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dipertustakaan yang sesuai dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat *diskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan melaporkan suatu permasalahan secara objek, gejala, kebiasaan, pemikiran tertentu dan dianalisis dengan kritis.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan Hukum Islam Tentang UpahPengangkut Sampah (Studi di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung).

## 3. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian ini, maka sumber data dapat diperoleh:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau tempat penelitian.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi sumber data premier dalam penelitian adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Bandar Lampung.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 21.

<sup>12</sup>Muhamad Pambundu Tika, *Metode Riset Bisnis*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 4.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah diperoleh dari pihak lain, yang berupa data dari beberapa buku dan wawancara.<sup>13</sup> Data sekunder yang diperoleh oleh penelitian dari buku-buku yang membicarakan topik baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung dengan judul yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu.<sup>14</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh pengangkut sampah dan pemilik rumah di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 158 orang.

b. Sampel Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.<sup>15</sup> Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 64.

<sup>14</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), h.

<sup>15</sup> *Ibid.* h.33.

Menurut Suharismi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Jadi sampel dari penelitian ini adalah  $10\% \times 158 = 16$  orang.

## 5. Metodologi Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara digunakan peneliti untuk menilai keadaan seseorang.<sup>16</sup>

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatapan muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.<sup>17</sup>

Adapun yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah pihak pengambil sampah di kelurahan sukrame kota Bandar lampung untuk mengetahui praktik pemberian upah terhadap pengambil sampah di kelurahan sukrame kota Bandar lampung tersebut, dan selanjutnya akan dilihat dari aspek hukum Islam

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis, dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 155.

<sup>17</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif*, (Bandung : ALFABETA, 2018),h. 214



benda tertulis, seperti buku-buku. Majalah. Dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>18</sup> Yang berhubungan dengan upah mengupah.

## 6. Metode Pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Langkah-langkah pengolahan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

### a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* adalah memeriksa kembali semua koesioner satu persatu dengan tujuan untuk mengecek apakah setiap kuesioner telah diisi sesuai dengan petunjuk atau belum. Semua kekurangan dan kerusakan ketika mengedit sebaiknya diperbaiki dengan jalan mengisi kembali koesioner yang masih kosong.<sup>19</sup>

### b) Sistematika Data

Sistematika Data bertujuan untuk menempatkan data-data yang diperoleh, kemudian dikelompokkan sesuai dengan ukuran masalah, data yang telah diperbaiki, selanjutnya diberi tanda menurut kategori-kategori secara urutan masalah.<sup>20</sup>

## 7. Metode Analisis data

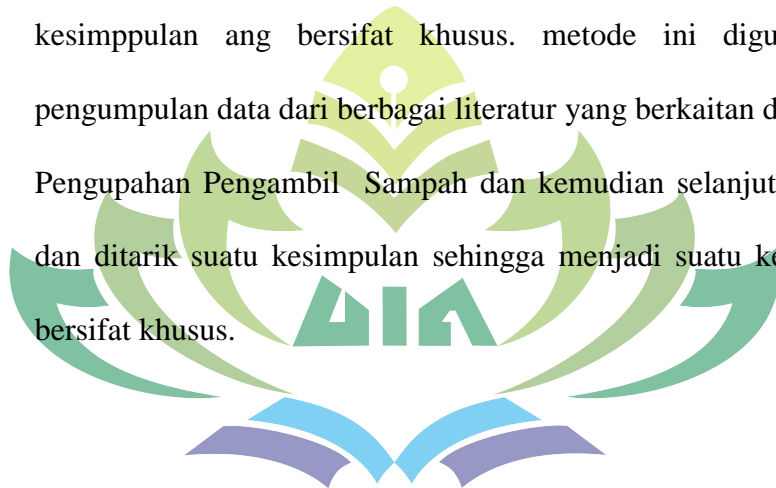
Data yang sudah di kumpulkan dan diolah menggunakan pemeriksaan data (*editing*), disusun secara sistematika data, dan

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 158.

<sup>19</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*...., h. 77

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 77.

kemudian di analisis secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Setelah data selesai di analisis maka hasilnya akan di sajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti. dari hasil tersebut kemudiian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif, cara berfikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut di tarik kesimpulan ang bersifat khusus. metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan Praktek Pengupahan Pengambil Sampah dan kemudian selanjutnya di analisa dan ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Upah Dalam Islam

###### a. Pengertian *Ijarah* (Upah)

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti *al-wadh* atau penggantian.<sup>1</sup> *Al-ajru* dan *al-ujroh* dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya.<sup>2</sup> Sedangkan menurut syara’ *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>3</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>4</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly , Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 277.

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, cet. 1, (Jakarta: Lentera, 2009), hal. 677.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.318.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 1108.

<sup>5</sup> *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI*, (Erlangga,2014), hal. 91.

Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah (rent, rental)* diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimma (reward, fair wage)* diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain-lain.

Menurut M. A. Tihami, *al-ijārah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa tertentu).<sup>6</sup>

*Al-ijārah* menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah ad-dzimah* atau upah-mengupah, seperti upah mencuci baju, dalam Islam sering disebut *ujrah*.<sup>7</sup>

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa

---

h.32 <sup>6</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011),

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h.227

mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik *musta'jir* (pihak yang mempekerjakan).<sup>8</sup>

Adapun secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah*, diantaranya:<sup>9</sup>

1. Ulama Hanafiyah

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مِلْكٌ

*Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta

2. Ulama Malikiyah

تَمْلِكُكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَا حَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan

3. Ulama syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَا حَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَلَدِ وَالْإِبَا حَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

*Ijarah*, adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, mengandung maksud tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan (upah) tertentu

4. Ulama Hanabilah

<sup>8</sup> Wabah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.86  
<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 227.



وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan *afal ijarah* dan *kara'* dan semacamnya.<sup>10</sup>

5. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَا دَلَةً عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِكُهَا  
بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian upah adalah suatu imbalan baik yang bersifat uang atau barang atas manfaat yang telah diberikan oleh pekerja. Karena akad *ijarah* merupakan sebuah transaksi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), dan bukan perpindahan hak kepemilikan.

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al- Qur'an dan Hadist Nabi.<sup>11</sup>

Pada dasarnya *ijarah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *ijarah* tidak jauh berbeda dengan akad-

<sup>10</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), hal. 85-86.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h.216

akad muamalah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual-beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal mubah (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>12</sup>

Akad *ijarah* juga termasuk dalam akad yang dapat memenuhi hajat kebutuhan kedua pihak, layaknya akad *mudharabah* dan akad *musaqah*. Sehingga Allah tidak mensyari'atkan akad-akad kecuali untuk kemaslahatan para hambanya dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka.<sup>13</sup> Akad tersebut harus diperbolehkan dalam hukum Islam, tidak diharamkan seperti adanya *gharar* (tipuan), *maisir* (judi), dan *riba*.<sup>14</sup>

#### **b. Dasar Hukum *Ijarah* (Upah-Mengupah)**

Dalam akad *ijarah*, hampir semua fuqaha sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis (as-sunnah), dan ijma'. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan al-Basri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, sebab *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

<sup>13</sup> A. Djasuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 130.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.123.

Pada dasarnya *ijarah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *ijarah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual-beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>16</sup> Akad *ijarah* juga termasuk dalam akad yang dapat memenuhi hajat kebutuhan kedua pihak, layaknya akad *mudharabah* dan akad *musaqah*. Sehingga Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali untuk kemaslahatan para hambanya dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka. Akad tersebut harus diperbolehkan dalam hukum Islam, tidak diharamkan seperti adanya *gharar* (tipuan), *maisir* (judi), dan *riba*.<sup>17</sup> Seperti dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya, Ibnu Taimiyah menyatakan dalam kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعْمَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>18</sup>

Ulama memperbolehkan *Ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al- Qur'an, Al-Sunah, dan Ijma.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 277.

<sup>17</sup> A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (*Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*), (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 130.

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Penerjemah: Fedrian Hasmand, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 9

## 1) Dasar hukum Ijarah dalam Al-Qur'an

Surat Ath- thalaq [65]: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka.

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.<sup>19</sup>

Surat An-Nahl [16] ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka akan pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan.

Maksud balasan dalam ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda.

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2015), h.246.

Surat Al-Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad *ijarah*. Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan.<sup>20</sup> Pendapat tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.

Surat At-Taubah Ayat 105

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 155.



وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: .... dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Q.S. at-Taubah: 105)

Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyelisihi perintah-perintah-Nya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya dan dihadapan kaum muslimin.<sup>21</sup>

## 2) Hadist Tentang *Ijarah*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ الْآ  
جِيرَاجَرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>22</sup>

Artinya: Dari Abdullah bin ‘Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)<sup>23</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِحْتَجِمْ وَأَعْطِ  
الْحَاجِمَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* (jilid 3), cet.2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), h. 585.

<sup>22</sup> Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 2004, h. 20

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 116.

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (HR Bukhari)<sup>25</sup>

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (رواه البخاري)<sup>26</sup>

Artinya : Dari Sa’ad Ibnu Waqas Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidaklah seseorang memakan makanan itu lebih baik di banding jika ia memakan dari jerih payahnya sendiri Sesungguhnya Nabi Daud selalu makan dari hasil keringatnya sendiri.” (HR Bukhari)<sup>27</sup>

### 3) Dasar Hukum Ijma’

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.<sup>28</sup> Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijarah*

<sup>24</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* ( Jakarta: Gramedia, 2017), h.105.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.116.

<sup>26</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim ...*,h.106.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*,h.120.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.318.

merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>29</sup>

### c. Rukun dan Syarat *Ijarah* (Upah-mengupah)

Pada dasarnya akad *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi, sehingga *ijarah* tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Adapun rukun *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>30</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun *ijarah* di sebutkan dalam Pasal 295, diantaranya terdapat *mu'jir* (pihak yang menyewa), *muajir* (pihak yang menyewakan), *ma'jur* (benda yang diijarahkan), dan akad.<sup>31</sup>

#### 1) Rukun *Ijarah*

Menurut Jumhur Ulama rukun *Ijarah* terdiri dari empat macam, diantaranya:

##### a) 'Aqidain (orang yang berakad)

Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atau orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang

<sup>29</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.131.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM). Ed. Rev. 2009. h. 87.

membayar upah, untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. *Aqid* disyaratkan harus orang yang baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>32</sup>

b) *Sighat* (ijab dan qabul), akad yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *Shighah* dalam transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu maksud, berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.<sup>33</sup>

c) *Ujrah* (uang sewa atau upah)

*Ujrah* atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui besaran jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.<sup>34</sup>

d) *Ma'qud 'alaih* (manfaat)

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh baik berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja.<sup>35</sup>

Masing-masing rukun yang membentuk suatu akad memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk terjadinya suatu akad.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h.170.

<sup>33</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 316.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.118.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.321.

<sup>36</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 97.

## 2) Syarat Upah (*Ujroh*)

*Pertama*, Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al- 'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan الرابطة dan الاتفاق kesepakatan.

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).

Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang mumayyiz tidak sah melakukan *ijarah*.



Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz saja.<sup>37</sup>

*Kedua*, syarat pelaksanaan *ijarah* ( *Syturut al-al-nafadz*). Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

*Ketiga*, syarat sah (*Syturut al-sihhah*) ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.<sup>39</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

<sup>37</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h.34-35.

<sup>38</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.106.

<sup>39</sup> *Ibid*, h.35.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.(QS-An-Nissa: 29)

Dari ayat diatas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>40</sup> Oleh sebab itu tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya *ajjir*, untuk menghalang-halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* atau upah, itu sama saja memperbudaknya sebagaimana dikatakan oleh fuqaha Islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang manggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.<sup>41</sup>

- b) Objek akad yaitu Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang

<sup>40</sup> Rachmawati, Eka Nuraini. “Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia.” *Al-'Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (14 Juli 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>41</sup> Wabah zuhaili, *Ibid.*, h. 84

melakukan akad *ijarah*.<sup>42</sup> kejelasan akad *ijarah* bisa dilakukan dengan dengan menjelaskan:

- 1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini” maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
  - 2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari di sewa.
  - 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja.  
Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju lengkap celana, dan ukurannya jelas.
- c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi secara syar’i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqih.

---

<sup>42</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.107.

- d) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'. Berdasarkan dabit ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya orang lain. Karena hal itu dilarang, dan secara syar'i tidak boleh dipenuhi.<sup>43</sup>
- e) Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setia mukmin. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'I berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an.
- f) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.<sup>44</sup>
- g) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.
- h) Syarat yang terkait dengan upah atau uang dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h.108.

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.235.

bahwa khamar dan Babi tidak boleh menjadi upah dalam akad ijarah karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis ).

Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.<sup>45</sup>

- 2) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambar- gambar. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu bermanfaat yang menjadi akad sewa menyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu barang- barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.<sup>46</sup>

- 3) Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*di-ghasab*), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta ghasab itu memungkinkan untuk diambil kembali.

---

<sup>45</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h.159.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h.160.



- 4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.<sup>47</sup>
- 5) Upah harus berupa *muttaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat mal *muttaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

#### d. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.161.

<sup>48</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h.874.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.<sup>49</sup> Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kaegori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ الْآ  
جِيرَاجِرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>50</sup>

Artinya: Dari ‘Abd. Allah ibn Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. (HR. Ibn Majah)<sup>51</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Dalam menjelaskan hadis diatas Syeikh yusuf Qhardhawi dalam kitabnya pesan nilai dan moral dalam perekonomian Islam menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan

<sup>49</sup> Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam...*, h.141.

<sup>50</sup> Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II, Dar al-Fikr...*,h. 20

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 116.

kesepakatan, karena umat islam terikat oleh syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi jika penundaan tersebut sangat lama hingga lupa dan tidak dibayarkan.<sup>52</sup>

#### e. Berakhirnya Upah (*Ijarah*)

Para ulama fiqh meyakini bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- 1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- 2) Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- 3) Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- 4) Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat mebatalkan akad *al-ijarah*

---

<sup>52</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*.., h.222.

itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>53</sup>

## 2. Pengertian Sampah

### a. Definisi Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>54</sup> Kemudian menurut Saefuddin dalam bukunya, sampah zat-zat yang berbentuk padat yang sudah tidak berfungsi atau bahan yang tak berguna, namun sebenarnya zat-zat buangan itu bila kita rajin menyusahkan dapat dimanfaatkan kembali.<sup>55</sup>

Menurut Azrul Azwar, sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena human waste tidak

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), h. 237-238.

<sup>54</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>55</sup> Saefuddin, *Sampah dan Penanggulangannya* (Bandung: Titian Ilmu, 2013), h. 2

termasuk kedalamnya) dan umumnya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk di dalamnya).<sup>56</sup>

Menurut Basriyanta, sampah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai atau dikelola dengan prosedur yang benar.

Menurut Kamus Lingkungan (1994), sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian, barang rusak atau cacat selama manufaktur, atau materi berlebihan atau buangan.

Menurut Setyo Purwendro, sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri ataupun aktivitas manusia lainnya sehingga dengan kata lain, sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai.

## **b. Sumber Sampah**

Sumber-sumber sampah dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam antara lain:<sup>57</sup>

### **1) Sampah dari Rumah Tangga**

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga antara lain berupa hasil pengolahan makanan, barang bekas dari perlengkapan rumah tangga, kertas, kardus, gelas, kain, tas bekas, sampah dari kebun dan halaman, batu baterai dan lain-lain. Terdapat jenis sampah rumah

<sup>56</sup> Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996), h. 54.

<sup>57</sup> Bambang Suwerda, *Bank Sampah* (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), h. 9-11.

tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang perlu penanganan khusus, agar tidak berdampak pada lingkungan, seperti batu baterai, bekas kosmetik, pecahan lampu, bekas semir dan lain-lain.

## 2) Sampah dari Pertanian

Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian pada umumnya berupa sampah yang mudah membusuk, seperti rerumputan dan jerami. Penanganan sampah dari kegiatan pertanian pada umumnya dilakukan pembakaran, yang dilakukan setelah panen. Jerami dikumpulkan di pojok sawah kemudian dibakar. Masih sedikit petani yang memanfaatkan jerami untuk pupuk. Selain sampah yang mudah membusuk, kegiatan pertanian menghasilkan sampah yang masuk kategori beracun (B3) seperti pestisida dan pupuk buatan, sehingga perlu dilakukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah plastik yang digunakan sebagai penutup tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, seperti pada penanaman cabai.

## 3) Sampah Sisa Bangunan

Pembangunan gedung-gedung yang dilakukan selama ini, akan menghasilkan sampah, seperti potongan kayu, triplek, bambu. Kegiatan pembangunan juga menghasilkan sampah seperti semen bekas, pasir, spesi, batu bata, pecahan ubin/kramik, potongan besi, pecahan kaca dan



kaleng bekas. Semakin banyak pembangunan gedung maka akan semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan.

#### 4) Sampah dari Perdagangan dan Perkantoran

Kegiatan pasar tradisional, warung, supermarket, toko, pasar swalayan, mall, menghasilkan jenis sampah yang beragam. Sampah dari perdagangan banyak menghasilkan sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, dedaunan, dan menghasilkan sampah tidak membusuk seperti kertas, kardus, plastik, kaleng, dan lain-lain. Kegiatan perkantoran termasuk fasilitas pendidikan menghasilkan sampah seperti kertas bekas, alat tulis-menulis toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin tik, klse film, komputer rusak dan lain-lain.

#### 5) Sampah dari Industri

Kegiatan di industri menghasilkan jenis sampah yang beragam, tergantung dari bahan baku yang digunakan, proses produksi dan out produk yang dihasilkan. Penerapan produksi bersih (cleaner productio) di industri perlu dilakukan untuk meminimisasi jumlah sampah yang dihasilkan.

### c. Jenis-Jenis Sampah

Sampah padat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti berikut :<sup>35</sup>

#### a) Berdasarkan Zat kimia yang terkandung di dalamnya.

- 1) Organik, Misal : sisa makanan, daun, sayur dan buah.
- 2) Anorganik, misal : logam, pecah-belah, abu dan lain-lain.

b) Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar.

- 1) Mudah terbakar, misalnya : kertas, plastik, daun kering dan kayu.
- 2) Tidak mudah terbakar, misal : kaleng, besi, gelas dan lain lain.

c) Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk.

- 1) Mudah membusuk, misal : sisa makanan, potongan daging dan sebagainya.
- 2) Sulit membusuk, misal : plastik, kaleng dan sebagainya.

d) Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah.

- 1) Garbade, terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat, khususnya ketika cuaca panas. Proses pembusukan sering kali menimbulkan bau busuk. Sampah jenis ini dapat ditemukan di tempat pemukiman, rumah makan, rumah sakit, pasar dan sebagainya.

2) *Rubbish*, terbagi menjadi dua :

- a) *Rubbish* mudah terbakar terdiri atas zat-zat organik, misal : kertas, kayu, karet, daun kering dan sebagainya
- b) *Rubbish* tidak mudah terbakar terdiri atas zat-zat anorganik misal : kaca, kaleng dan sebagainya.

3) *Ashes*, semua sisa pembakaran dari industri.

4) *Sweet sweeping*, sampah dari jalan atau trotoar akibat aktivitas mesin atau manusia.

5) *Dead Animal*, bangkai binatang besar (anjing, kucing dan sebagainya) yang mati akibat kecelakaan atau secara alami.

- 6) *House hold Refuse*, atau sampah campuran (misal :garbage, ashes, rubbish) yang berasal dari perumahan.
- 7) *Abandonet vehidle*, berasal dari bangkai kendaraan.
- 8) *Demolisin waste*, berasal dari sisa-sisa pembangunan gedung.
- 9) *Contruktion waste* berasal dari sisa-sisa pembangunan gedung seperti : tanah, batu dan kayu.
- 10) Sampah industri, berasal dari pertanian, perkebunan dan industri
- 11) Santage solid, terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik, pada pintu masuk pusat pengolahan limbah cair.
- 12) Sampah khusus, atau sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif.

#### d. **Pengelolaan Sampah**

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air atau tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya.<sup>58</sup> Pengelolaan sampah menurut UU Nomor 18 Tahun

---

<sup>58</sup> Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan..*, h. 56.

2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>59</sup>

Dalam fatwa MUI tentang pengelolaan sampah untuk menghindari kerusakan lingkungan bahwa setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.<sup>60</sup> Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan, pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah serta berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.<sup>61</sup>

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, pembicaraan tentang pengelolaan sampah meliputi tiga hal pokok yakni :

#### 1) Penyimpanan Sampah (*refuse storage*)

Penyimpanan sampah adalah tempat sampah sementara, sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta dimusnahkan.<sup>62</sup> Pada awalnya setiap rumah tangga menampung

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 ayat 5

<sup>60</sup> Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Pasal 2 ayat 1 dan 4.

<sup>61</sup> Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Pasal 3

<sup>62</sup> Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan..*, h.57.

sampah-sampah mereka dalam tempat-tempat sampah yang mereka miliki.

## 2) Pengumpulan Sampah (*refuse collection*)

Dalam waktu-waktu tertentu, misalnya 2 atau 3 hari sekali petugas kebersihan RT/RW ataupun kotamadya akan mengumpulkan sampah-sampah itu dari setiap rumah tangga. Dengan gerobak tarik atau menggunakan mobil truk sampah, sampah diangkut ke suatu pusat pembuangan sampah yang sudah disepakati oleh pengurus lingkungan, baik dari RT/RW maupun kotamadya.

## 3) Pembuangan Sampah (*refuse disposal*)

Tahap terakhir yaitu “pemusnahan” sampah. Caranya bermacam-macam tergantung pada kepentingan dan pihak mana yang menanganinya. Sampah yang digunakan untuk menimbun tanah berbeda penanganannya dengan sampah yang digunakan untuk kompos. Begitu pula dengan teknik penanganannya, akan sangat berbeda antara pemerintah, lembaga usaha swasta, dan perorangan atau rumah tangga.<sup>63</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi penyimpanan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan dan pembuangan akhir.

---

<sup>63</sup> Wied Harry Apriadi, *Memproses Sampah* (Bogor: Penebar Swadaya, 2006), h. 7.

**Tabel 1**  
Rentang Waktu Pengolahan Sampah (*Dekomposisi*)

Jenis Sampah	Waktu
- Tali senar dan kantung plastik	600 tahun
- Sandal dan botol plastik	450 tahun
- Plastik basah	400 tahun
- Kaleng soda dan alumunium	200 tahun
- Kaleng	110 tahun
- Plampung	90 tahun
- Plastik	80 tahun
- Ban mobil	50 tahun
- Pakaian nylon	40 tahun
- Kulit sepatu	40 tahun
- Kantong plastik	20 tahun
- Kayu yang dicat	15 tahun
- Filter rokok	12 tahun
- Tali sumbu kompor	10 tahun
- Bungkus rokok dan pembalut wanita	5 tahun
- Dos karton	5 tahun
- Kotak pembungkus susu	3 tahun
- Dus pembungkus makanan	2 tahun
- Kertas Koran	1,5 tahun
- Kertas tisu, organik	1 tahun
- Bahan organik, daun-daun kering	5 bulan
- Sisa sayuran dan sisa buah-buahan	3 Bulan

Sumber: Wied Harry Apriadi, *Memproses Sampah* (Bogor: Penebar Swadaya, 2006)

#### 4) Pemanfaatan Sampah

Amanat utama pengelolaan sampah dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpulan-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber (*reduce at source*) dan daur ulang sumberdaya (*resources recycle*).

Pendekatan yang digunakan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), pemanfaatan sampah, *extended producer responsibility* (EPR). Dengan menjalankan prinsip 3R maka terjadi upaya pengurangan



ekstraksi sumber daya karena sebagian bahan baku dapat terpenuhi dari sampah yang didaur ulang dan sampah yang digunakan ulang.

Berikut prinsip-prinsip 3R (reduce, reuse, recycle):

a) *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah dan menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan produk sekali pakai, menggunakan tas kain/keranjang untuk mengurangi pemakaian kantong belanja plastik.<sup>64</sup> Pengurangan tidak hanya berupa jumlah saja, tetapi juga mencegah penggunaan barang yang mengandung kimia berbahaya dan tidak mudah terdekomposisi.<sup>65</sup>

b) *Reuse* adalah menggunakan kembali sampah (barang-barang) selama mungkin dan tidak harus selalu membeli yang baru.<sup>66</sup>

Tujuan reuse adalah untuk memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang-barang secara langsung.<sup>67</sup>

c) *Recycle* adalah memanfaatkan kembali (daur ulang) sampah setelah mengalami proses pengolahan (perubahan bentuk), atau kembalikan pada produsen/pabrik. Upaya ini memerlukan campur tangan produsen dalam prakteknya. Namun beberapa

<sup>64</sup> Avianto et.al, *Tingkatkan Taqwa Melalui Kepedulian Lingkungan* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Pengurus Besar Nadhatul Ulama, 2011), h. 49.

<sup>65</sup> Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*(Bogor: Penebar Swadaya, 2011),h. 30.

<sup>66</sup> Avianto et.al, *Tingkatkan Taqwa Melalui Kepedulian Lingkungan..*, h.49

<sup>67</sup> Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, h.30.

sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat. Pengomposan, pembuatan batako, dan briket merupakan contoh produk hasilnya.<sup>68</sup>

Beberapa cara yang bisa dilakukan pada cara pemanfaatan sampah antara lain :

a) Penimbunan Tanah

Sampah yang terkumpul dimanfaatkan untuk menimbun tanah rendah. Sampah ditimbun begitu saja sampai menggunung, lalu diratakan dan dipadatkan. Setelah ketinggian permukaannya mencapai yang diinginkan penimbunan sampah diberhentikan. Jenis sampah yang digunakan adalah sampah jenis rubbish saja, seperti kertas-kertas, potongan kayu, potongan besi, dan seng atau kaleng bekas.

b) Penimbunan Tanah secara Sehat

Cara penimbunannya pun sama seperti penimbunan yang diatas, perbedaannya lapisan tanah harus setebal 60 cm dan jenis sampah yang digunakan adalah sampah jenis *rubbish* dan *garbage*.

c) Pengomposan

Langkah-langkah pengomposan sebagai berikut :

(1) Sampah-sampah jenis *garbage* dikumpulkan.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h.31.

(2) Sampah dihancurkan leburkan menggunakan mesin khusus sampai lumat.

(3) Sampah kemudian ditimbun secara teratur dalam suatu hamparan tertutup yang bisa diawasi suhu, tingkat kelembapan, dan aliran udaranya menggunakan alat khusus. Kompos juga lebih baik jika dilapisi dengan lumpur dasar sungai. Proses pembuatan sampah ini biasanya berlangsung antara 2 hari hingga 6 minggu.

(4) Setelah kompos jadi segera dikeringkan kemudian digiling.

d) Makanan Ternak

Sampah jenis *garbage*, seperti sisa sayuran, ampas tapioka, ampas tahu bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak.

e) Pemanfaatan Ulang

Sampah-sampah juga bisa digunakan untuk didaur ulang, seperti kerajinan tangan, dibuat kembali seperti bentuk awalnya.

Contohnya adalah kertas-kertas, botol bekas, plastik, logam-logam, kardus, dan lain lain.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> .Wied Harry Apriadji, *Memproses Sampah* (Bogor: Penebar Swadaya, 2006), h. 8-11.

### e. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pengelolaan Sampah

#### 1. Islam melarang berbuat kerusakan

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Araf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ  
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Qs. Al-Araf : 56)

Ayat diatas berisi larangan agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi tidaklah sedikit. Walaupun tentu saja ini tidak berarti bahwa bila ayat yang berisi perintah atau larangan hanya sedikit maka tidak perlu memperhatikan ayat tersebut.

Seperti diketahui Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas yaitu, agar ia menjadi khalifah di bumi ini. Manusia di beri tugas agar memelihara, menjaga serta mengelola bumi ini. Artinya demi kelangsungan, kepentingan serta kenyamanan kita sebagai manusia, Allah SWT sebagai pemilik tunggal bumi (dan seluruh alam semesta) mengizinkan kita mendaya gunakan bumi dan seluruh isinya secara maksimal. Ini adalah sifat utama-Nya, yaitu Ar-Rahman, Yang Maha Pengasih.

Dalam penjelasan di atas di jelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirimkan manusia

sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi.

Keserakahan sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 41- 42 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
عَنْبَتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".(Q.S. Ar-Rum : 41-42)

Ayat di atas menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat perbuatan manusia hal tersebut hendaknya disadari oleh manusia harus segera menghentikan perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan menggantinya dengan perbuatan baik dan bermanfaat untuk kelestarian alam.

## 2. Islam Melarang Perbuatan Tabdzir

Islam adalah agama yang sangat keras melarang perbuatan tabdzir. Tabdzir adalah menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan.

Hal ini tentunya sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, sampai-sampai orang yang melakukan perbuatan tabdzir disebut sebagai saudaranya syetan, Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : “Janganlah kalian berbuat Tabdzir, karena orang-orang yang mubadzr itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q.S Al-Isra“ : 27)

Ketika semua sampah bisa kita kelola menjadi sesuatu yang produktif dan memberikan kemaslahatan bagi mahluk, maka orang yang tidak terlibat dengan pengelolaan sampah yang benar-benar bisa serta mampu dikelola dengan baikatas dasar kesanggupannya menurut terminologi tabdzir tadi, akan jatuh dalam perilaku saudaranya syetan. Akan tetapi bila sampah tersebut masuk kategori sampah yang tidak dapat di kelola kembali maka tidak masuk dalam perbuatan tabdzir.

Karena pengelolaan sampah memberikan maslahat besar bagi kita sendiri, anak cucu kita dan alam sekitar kita, tentu ini menjadi aktifitas yang bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan karenanya kita diperintahkan Allah SWT untuk ikut andil dalam segala aktifitas yang memberikan



kemaslahatan, termasuk pengelolaan sampah untuk menjaga bumi dari kerusakan yang di timbulkan oleh sampah.

**f. Dampak Negatif Sampah yang Tidak Dikelola**

Ada tiga dampak negatif sampah jika tidak dikelola diantaranya:

- 1) Dampak terhadap kesehatan adalah tempat berkembang biak organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia.
- 2) Dampak terhadap lingkungan adalah mati atau punahnya flora dan fauna serta menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam seperti terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon.
- 3) Dampak terhadap sosial ekonomi adalah menyebabkan bau busuk, pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negatif pada pariwisata secara bencana seperti banjir.

**B. Kajian Pustaka**

Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan pemberian upah pekerja diantaranya:

1. Artikel Syamsul Hilal, “*Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat*” Tahun 2013. Dalam Artikel tersebut dijelaskan tentang pelaksanaan akad ijarah baik sewa menyewa maupun upah dengan baik dan benar yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahwasannya *ijarah* merupakan jual beli manfaat barang atau pun jasa (baik jasa profesional maupun non profesional) yang mengharuskan adanya dua pihak yang

menguatkan diri. dalam suatu diktum-diktum kesepakatan dengan tenggang waktu dan tujuan tertentu.

2. Artikel dari Siswadi tentang *“Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan”* Tahun 2014. Artikel tersebut menerangkan tentang pengupahan yang sesuai dan benar menurut Islam. Pengupahan harus bersifat adil di antara kedua belah pihak, karena menurut Islam Upah sangat berkaitan dengan konsep moral tidak hanya bersifat materi sehingga diperlukan sikap keadilan dan kelayakan.
3. Penelitian Siti Saroh yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktik Ijol Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)”* tahun 2016. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, praktik sewa menyewa dalam ijol garapan di Desa Rajegwesi telah memenuhi rukun ijarah, meskipun ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi tetapi praktik ijol garapan diperbolehkan menurut hukum Islam, karena akad tersebut banyak mengandung kemaslahatan dan bermanfaat bagi para petani. Serta kesepakatan yang sikap saling ridho dari kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- A.Djasuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996).
- Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012.
- Creswel, John W. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Pasal 2 ayat 1 dan 4.
- Gibson. L James, *Organisasi dan Manajemen: Prilaku, Struktur dan Proses*, Jakarta: Erlangga, 1986.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI*, Erlangga, 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2014.

- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM). Ed. Rev. 2009.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhamad Pambundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, cet. 1, Jakarta: Lentera, 2009.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Darul-Fikr, Beirut, 2004.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*, Jakarta: Gramedia, 2017.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* Damaskus: Darul Musthafa, 2009.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 47 Ayat: 1 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786. (on-line), tersedia

di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (14 Juli 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Saefuddin, *Sampah dan Penanggulangannya*, Bandung: Titian Ilmu, 2013.

Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil, Abd al-Karim)* Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016.

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, 1993.

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif*, Bandung : ALFABETA, 2018.

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2011.

Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kastsir (jilid 3)*, cet.2, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indah, 2011.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Wabah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam 7 Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Penerjemah: Fedrian Hasmand, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

## **WAWANCARA**

Wawancara bapak Wandu, masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung tanggal 12 Juni 2020

Wawancara bapak Suud, masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung  
tanggal 20 Juni 2020

Wawancara Alifah, anak kos Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung sebagai  
buruh pada tanggal 22 Juli 2020

Wawancara Ibu Dewi , masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung  
tanggal 20 Juni 2020

Wawancara Ibu Baiq Farihun, masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar  
Lampung tanggal 20 Juli 2020

Wawancara Tina, anak kos Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung sebagai  
buruh pada tanggal 22 Juli 2020

Wawancara Ibu Asa, masyarakat Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung tanggal  
10 Juli 2020

Wawancara Pak Irul, Selaku Petugas kebersihan, Kelurahan Sukarame Kota Bandar  
Lampung tanggal 20 Juli 2020

